



## Evaluasi Kebijakan Praktik Kerja Lapangan Berbasis Model Dunn pada Siswa SMK di Era Revolusi Industri 4.0

Dwi Supriono<sup>1\*</sup>, Budi Purwoko<sup>2</sup>, Mufarrihul Hazin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Korespondensi penulis: [25010845049@mhs.unesa.ac.id](mailto:25010845049@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *Practical Work Experience (Praktik Kerja Lapangan/PKL) is one of the key human capital development strategies in vocational education that plays a crucial role in preparing vocational high school (SMK) graduates to meet labor market demands in the era of the Industrial Revolution 4.0. However, the effectiveness of PKL implementation requires systematic evaluation to ensure its alignment with vocational education policy objectives. This study aims to evaluate the implementation of PKL policy based on students' perceptions using William N. Dunn's policy evaluation model, which comprises six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study employed a quantitative descriptive-evaluative approach using a survey method. The research sample consisted of 224 twelfth-grade students who had completed PKL at SMK Negeri 1 Slahung, Ponorogo. Data were collected through a closed-ended questionnaire using a four-point Likert scale developed based on Dunn's policy evaluation indicators and analyzed using descriptive statistics and reliability testing. The results indicate that, overall, the implementation of PKL is perceived as good, with effectiveness and appropriateness emerging as the strongest dimensions from the students' perspective. Meanwhile, responsiveness and equity demonstrate relatively lower achievement compared to other dimensions. These findings suggest that PKL has contributed positively to enhancing students' work readiness; however, further improvements are needed in terms of responsiveness to dynamic industry needs and the equitable provision of PKL opportunities and services. This study offers practical implications for vocational education stakeholders in improving the quality and sustainability of PKL as a human capital development strategy in the era of the Industrial Revolution 4.0.*

**Keywords:** *practical work experience; policy evaluation; Dunn's model; vocational education; Industrial Revolution 4.0*

**Abstrak.** Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu strategi pengembangan *human capital* dalam pendidikan vokasi yang berperan penting dalam menyiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menghadapi tuntutan dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PKL perlu dievaluasi secara sistematis agar selaras dengan tujuan kebijakan pendidikan vokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PKL berdasarkan persepsi siswa SMK dengan menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-evaluatif dengan metode survei. Sampel penelitian terdiri atas 224 siswa kelas XII yang telah melaksanakan PKL di SMK Negeri 1 Slahung Ponorogo. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup berskala Likert 1–4 yang dikembangkan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan Dunn, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PKL berada pada kategori baik, dengan dimensi efektivitas dan ketepatan sebagai aspek terkuat menurut persepsi siswa. Sementara itu, dimensi responsivitas dan pemerataan masih menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa PKL telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesiapan kerja siswa, namun masih memerlukan penguatan dalam hal penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan industri serta pemerataan kesempatan dan layanan PKL. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola pendidikan vokasi dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan PKL sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia di era Revolusi Industri 4.0.

**Kata kunci:** *praktik kerja lapangan; evaluasi kebijakan; model Dunn; pendidikan vokasi; Revolusi Industri 4.0*

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam struktur pasar kerja global, ditandai oleh percepatan digitalisasi, otomatisasi proses produksi, serta meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki kompetensi lintas bidang. Transformasi ini menempatkan pendidikan vokasi pada posisi strategis sekaligus menantang, karena institusi pendidikan kejuruan dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah (OECD, 2023; UNESCO, 2022). Dalam konteks ini, keberhasilan pendidikan vokasi sangat ditentukan oleh sejauh mana pembelajaran mampu menjembatani kesenjangan antara dunia sekolah dan dunia kerja secara nyata dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen utama yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL diposisikan sebagai strategi pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*) yang berfungsi sebagai wahana internalisasi kompetensi teknis, penguatan soft skills, serta pembentukan etos kerja profesional siswa SMK sebelum memasuki pasar tenaga kerja (Rahmatullah et al., 2023). Dalam perspektif teori *human capital*, PKL merupakan bentuk investasi pendidikan yang bernilai strategis karena memberikan pengalaman kerja riil yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas, kesiapan kerja, dan daya saing lulusan (Becker, 1993; Schultz, 1961). Dengan demikian, kualitas implementasi PKL memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas kebijakan pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan vokasi.

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi PKL di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan struktural dan operasional. Beberapa penelitian mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kompetensi siswa dan jenis pekerjaan di industri, keterbatasan pembimbingan, lemahnya monitoring, serta kesenjangan kualitas pengalaman PKL antar siswa dan antar sekolah (Dewi et al., 2023; Muthi, 2024; Sarmila et al., 2025). Selain itu, dinamika kebutuhan industri yang semakin kompleks sering kali belum sepenuhnya direspons secara adaptif oleh sekolah, sehingga PKL berisiko menjadi aktivitas administratif semata, bukan sebagai proses pembelajaran strategis yang berdampak jangka panjang terhadap kesiapan kerja siswa.

Kajian literatur mutakhir periode 2020–2025 juga memperlihatkan bahwa sebagian besar penelitian PKL masih berfokus pada pengukuran dampak terhadap kesiapan kerja atau kompetensi lulusan, baik melalui pendekatan deskriptif maupun model evaluasi

pendidikan seperti CIPP (Bajuri, 2025; Deanda et al., 2024). Di sisi lain, kajian yang memosisikan PKL sebagai objek evaluasi kebijakan publik masih relatif terbatas, khususnya yang menggunakan kerangka evaluasi kebijakan komprehensif seperti model William N. Dunn. Padahal, pendekatan evaluasi kebijakan memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap kinerja PKL tidak hanya dari aspek hasil, tetapi juga dari sisi efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan dalam menjawab kebutuhan sasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pelaksanaan PKL telah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan yang ideal. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana tingkat efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan PKL berdasarkan persepsi siswa sebagai penerima langsung kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kontribusi masing-masing dimensi evaluasi tersebut terhadap penilaian keseluruhan pelaksanaan PKL dalam konteks pendidikan vokasi di era Revolusi Industri 4.0.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja PKL berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan Dunn serta menganalisis pengaruh setiap indikator terhadap outcome pelaksanaan PKL. Fokus pada persepsi siswa dipilih karena siswa merupakan aktor kunci yang mengalami secara langsung proses, dinamika, dan dampak PKL, sehingga penilaiannya merefleksikan efektivitas kebijakan pada level implementasi (*policy outcomes*).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan **model evaluasi kebijakan Dunn** dalam menilai pelaksanaan PKL di SMK, sebuah pendekatan yang masih jarang digunakan dalam kajian pendidikan vokasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini secara eksplisit menempatkan siswa sebagai subjek evaluasi kebijakan, bukan sekadar objek program, serta mengaitkan evaluasi PKL dengan konteks strategis pengembangan *human capital* di era Revolusi Industri 4.0. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi evaluasi kebijakan pendidikan vokasi sekaligus rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas dan keberlanjutan program PKL di SMK.

## 2. KAJIAN TEORITIS

## 2.1 Kebijakan Praktik Kerja Lapangan dan Human Capital Theory

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam pendidikan vokasi merupakan instrumen kebijakan strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengalaman belajar berbasis kerja (*work-based learning*). Dalam perspektif teori *human capital*, pendidikan dan pelatihan kerja dipandang sebagai bentuk investasi yang mampu meningkatkan produktivitas individu dan memberikan pengembalian ekonomi jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat (Becker, 1993; Schultz, 1961). PKL, sebagai bagian integral dari kurikulum SMK, berfungsi mempertemukan pengetahuan teoretis dengan praktik nyata di dunia kerja, sehingga memperkuat kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik.

Sejalan dengan itu, Psacharopoulos dan Patrinos (2018) menegaskan bahwa investasi pendidikan menengah kejuruan memiliki tingkat pengembalian yang signifikan, terutama ketika pembelajaran dirancang selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam konteks Indonesia, PKL diposisikan sebagai mata pelajaran wajib dalam Kurikulum Merdeka, dengan durasi yang relatif panjang (6–10 bulan), yang bertujuan memastikan siswa memperoleh pengalaman kerja autentik sebelum lulus (Rahmatullah et al., 2023). Dengan demikian, efektivitas PKL tidak hanya menentukan keberhasilan pembelajaran siswa, tetapi juga mencerminkan kinerja kebijakan pengembangan *human capital* di sektor pendidikan vokasi.

## 2.2 PKL dalam konteks Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 telah menggeser kebutuhan kompetensi tenaga kerja dari sekadar keterampilan teknis menuju keterampilan abad ke-21 yang mencakup pemecahan masalah kompleks, kolaborasi, komunikasi, adaptabilitas, dan literasi digital (OECD, 2023; UNESCO, 2022). Pendidikan vokasi dituntut untuk merespons perubahan ini melalui penguatan pembelajaran berbasis industri dan peningkatan relevansi kurikulum terhadap perkembangan teknologi.

PKL menjadi medium strategis untuk mentransformasikan tuntutan Revolusi Industri 4.0 ke dalam pengalaman belajar siswa. Studi internasional menunjukkan bahwa *work-based learning* dan *apprenticeship* yang terstruktur mampu meningkatkan kesiapan kerja dan transisi lulusan ke dunia industri secara signifikan. Di Indonesia, kebijakan *link and match* dan Program SMK Pusat Keunggulan memperkuat peran PKL sebagai sarana sinkronisasi antara sekolah dan industri, termasuk dalam penguasaan teknologi digital dan praktik kerja berbasis standar industri (Wahjusaputri et al., 2023).

### 2.3 Model Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Evaluasi kebijakan publik bertujuan menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat optimal bagi kelompok sasaran. Dunn (2018) mengemukakan enam kriteria utama evaluasi kebijakan, yaitu **efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness)**. Keenam indikator ini memungkinkan analisis kebijakan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan distribusi manfaat kebijakan.

Dalam konteks PKL, efektivitas merefleksikan sejauh mana PKL mampu meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja siswa. Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, waktu, dan pengelolaan program. Kecukupan menilai apakah durasi, pembekalan, dan bimbingan PKL sudah memadai. Pemerataan menyoroti aspek keadilan akses dan perlakuan siswa. Responsivitas mengukur kemampuan sekolah dan industri menyesuaikan PKL dengan kebutuhan aktual dunia kerja, sedangkan ketepatan menilai kesesuaian PKL sebagai strategi kebijakan pendidikan vokasi. Kerangka ini relevan digunakan untuk mengevaluasi PKL sebagai kebijakan pendidikan, bukan sekadar program pembelajaran.

### 2.4 Penelitian Terdahulu tentang PKL

Penelitian terkait PKL dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa program ini secara umum berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja siswa. Studi kuantitatif oleh Deanda et al.(2024) menemukan bahwa pengalaman magang industri berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja siswa SMK, meskipun kontribusinya masih relatif kecil jika tidak didukung oleh faktor lain seperti motivasi dan keterampilan komunikasi. Sementara itu, Widjaja (2025) menegaskan bahwa magang berbasis teknologi efektif meningkatkan keterampilan praktis siswa, tetapi masih menghadapi kendala kesiapan siswa dan kualitas proyek magang.

Pendekatan evaluatif kualitatif juga banyak digunakan, seperti model CIPP yang diterapkan oleh Muthi (2024), Bajuri (2025), dan Dewi et al. (2023). Temuan mereka menunjukkan bahwa PKL umumnya berjalan efektif dari sisi hasil, tetapi masih lemah pada aspek input dan proses, terutama pembekalan, supervisi, dan keterlibatan industri. Studi lain menyoroti pentingnya kemitraan sekolah–industri yang kuat sebagai faktor kunci keberhasilan PKL (Sarmila et al., 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara eksplisit memosisikan PKL sebagai objek evaluasi kebijakan publik dengan kerangka evaluasi

yang komprehensif. Selain itu, persepsi siswa sebagai penerima langsung kebijakan PKL masih relatif jarang dijadikan fokus utama analisis kuantitatif berbasis model kebijakan Dunn.

## 2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori *human capital* dan model evaluasi kebijakan Dunn, penelitian ini memposisikan pelaksanaan PKL sebagai kebijakan pendidikan vokasi yang dievaluasi melalui enam dimensi utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam dimensi tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap **evaluasi keseluruhan PKL** sebagai outcome kebijakan, yang direpresentasikan oleh persepsi siswa terhadap kualitas dan manfaat PKL.

Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa kualitas PKL tidak ditentukan oleh satu dimensi tunggal, melainkan oleh interaksi berbagai aspek kebijakan yang saling terkait. Dengan demikian, analisis berbasis Dunn memungkinkan pemetaan kekuatan dan kelemahan implementasi PKL secara lebih holistik.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif evaluatif** dengan metode survei untuk mengevaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai kebijakan pendidikan vokasi. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan **evaluative judgement**, yaitu penilaian kebijakan berdasarkan seperangkat kriteria normatif yang telah ditetapkan secara teoretis dan kebijakan publik.

Kerangka evaluasi mengacu pada model evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan (*appropriateness*). Pendekatan ini memungkinkan penilaian kinerja PKL secara komprehensif tanpa menekankan pada pengujian hubungan kausal antarvariabel, melainkan pada tingkat ketercapaian tujuan dan kualitas implementasi kebijakan berdasarkan persepsi siswa sebagai penerima langsung kebijakan.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai salah satu satuan pendidikan menengah vokasi yang secara aktif melaksanakan program PKL sesuai kebijakan nasional pendidikan vokasi.

Pengumpulan data dilakukan pada siswa kelas XII yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan PKL pada tahun pelajaran berjalan.

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XII SMK Negeri 1 Slahung yang mengikuti PKL, dengan jumlah total sebanyak **412 siswa**. Teknik pengambilan sampel menggunakan **purposive sampling**, dengan kriteria responden adalah siswa yang telah menyelesaikan PKL dan mengisi kuesioner secara lengkap.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh **224 responden**, yang dinilai telah memenuhi ukuran sampel yang memadai untuk analisis statistik deskriptif dan evaluasi kebijakan berbasis persepsi. Jumlah sampel ini juga telah mencukupi untuk menggambarkan kecenderungan penilaian siswa terhadap pelaksanaan PKL secara representatif.

### 3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan Dunn. Seluruh item pernyataan menggunakan skala Likert 4 poin, yaitu: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat setuju. Penggunaan skala 4 poin dimaksudkan untuk menghindari pilihan netral dan mendorong kejelasan sikap responden dalam memberikan penilaian. Jumlah item per dimensi adalah sebagai berikut: Efektivitas: 5 item, Efisiensi: 4 item, Kecukupan: 5 item, Pemerataan: 4 item, Responsivitas: 4 item, dan Ketepatan: 5 item. Seluruh item dirumuskan berdasarkan kajian literatur dan kebijakan PKL nasional, sehingga memiliki kesesuaian konseptual dengan tujuan evaluasi kebijakan pendidikan vokasi.

### 3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas instrumen diuji melalui validitas isi (*content validity*) dengan memastikan kesesuaian indikator dan item pernyataan terhadap konsep evaluasi kebijakan Dunn dan kebijakan PKL nasional. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas empiris menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* untuk mengukur konsistensi internal setiap konstruk. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha  $\geq 0,70$ . Uji reliabilitas ini bertujuan memastikan bahwa instrumen mampu mengukur persepsi siswa secara konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian evaluatif kebijakan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner daring melalui platform Google Form. Setiap responden hanya diperkenankan mengisi kuesioner satu kali untuk

menghindari duplikasi data. Seluruh item bersifat wajib diisi, sehingga tidak terdapat data kosong (*missing values*). Data yang terkumpul kemudian diekspor ke format spreadsheet untuk keperluan analisis statistik.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan analisis kebijakan evaluatif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi siswa terhadap pelaksanaan PKL berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan Dunn. Analisis meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta kategorisasi tingkat penilaian.

Selain itu, dilakukan uji reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach's Alpha. Hasil statistik kemudian dianalisis secara interpretatif-evaluatif dengan membandingkan temuan empiris terhadap standar kebijakan PKL nasional, literatur pendidikan vokasi, serta konteks tuntutan Revolusi Industri 4.0. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan penilaian kebijakan (*policy judgement*) yang menyoroti kekuatan, kelemahan, dan implikasi perbaikan kebijakan PKL di tingkat satuan pendidikan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 224 siswa kelas XII SMK Negeri 1 Slahung yang telah menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Seluruh responden mengisi kuesioner secara lengkap tanpa data kosong (*missing values*), sehingga seluruh data layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Responden merupakan representasi siswa dari berbagai kompetensi keahlian yang mengikuti PKL sesuai dengan kebijakan sekolah dan ketentuan nasional pendidikan vokasi.

#### 4.1.2 Statistik Deskriptif Evaluasi PKL Berdasarkan Dimensi Dunn

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi siswa terhadap pelaksanaan PKL berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kinerja PKL.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Evaluasi PKL

| <b>Dimensi Evaluasi</b> | <b>Mean</b> | <b>Standar Deviasi</b> | <b>Kategori Penilaian</b> |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| Efektivitas             | 3,337       | 0,583                  | Tinggi                    |
| Efisiensi               | 3,369       | 0,560                  | Tinggi                    |
| Kecukupan               | 3,302       | 0,571                  | Tinggi                    |
| Pemerataan              | 3,268       | 0,575                  | Tinggi                    |
| Responsivitas           | 3,256       | 0,514                  | Tinggi                    |
| Ketepatan               | 3,385       | 0,577                  | Tinggi                    |

Berdasarkan Tabel 1, seluruh dimensi evaluasi PKL berada pada **kategori tinggi**, yang menunjukkan bahwa secara umum siswa menilai pelaksanaan PKL di SMK Negeri 1 Slahung telah berjalan dengan baik. Dimensi ketepatan memperoleh nilai rata-rata tertinggi, diikuti oleh efisiensi, sedangkan responsivitas dan pemerataan memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya, meskipun tetap berada dalam kategori positif.

#### 4.1.3 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi internal instrumen dalam mengukur setiap dimensi evaluasi kebijakan PKL. Reliabilitas diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha  $\geq 0,70$ .

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

| <b>Dimensi Evaluasi</b> | <b>Cronbach's Alpha</b> | <b>Keterangan</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Efektivitas             | 0,759                   | Reliabel          |
| Efisiensi               | 0,842                   | Sangat reliabel   |
| Kecukupan               | 0,781                   | Reliabel          |
| Pemerataan              | 0,755                   | Reliabel          |
| Responsivitas           | 0,857                   | Sangat reliabel   |
| Ketepatan               | 0,856                   | Sangat reliabel   |

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh dimensi evaluasi memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas ambang batas minimum. Hal ini menandakan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan layak digunakan sebagai dasar penilaian evaluatif terhadap kebijakan PKL.

#### 4.1.4 Sintesis Evaluatif Pelaksanaan PKL

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan uji reliabilitas, dilakukan sintesis evaluatif untuk mengidentifikasi dimensi terkuat, dimensi yang masih perlu penguatan, serta pola umum persepsi siswa terhadap pelaksanaan PKL.

**a. Dimensi Terkuat Pelaksanaan PKL**

Dimensi ketepatan dan efisiensi merupakan aspek dengan skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menilai PKL sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesiapan kerja serta telah dikelola dengan pemanfaatan waktu, tugas, dan pengaturan kegiatan yang relatif efisien. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan PKL telah selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan kebijakan pendidikan vokasi.

**b. Dimensi yang Masih Perlu Penguatan**

Meskipun berada pada kategori tinggi, dimensi responsivitas dan pemerataan memperoleh skor rata-rata terendah dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam hal penyesuaian PKL terhadap dinamika kebutuhan industri terkini serta dalam menjamin kesetaraan pengalaman PKL antar siswa, khususnya terkait penempatan dan dukungan selama pelaksanaan PKL.

**c. Pola Umum Persepsi Siswa**

Secara umum, siswa memandang PKL sebagai pengalaman belajar yang bermakna, relevan dengan kompetensi keahlian, serta berkontribusi positif terhadap pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis. Pola persepsi ini menunjukkan bahwa PKL telah berfungsi sebagai instrumen kebijakan pendidikan vokasi yang efektif dalam menjembatani pembelajaran di sekolah dengan dunia kerja nyata.

**d. Ringkasan Temuan Utama**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKL di SMK Negeri 1 Slahung dinilai **baik hingga sangat baik** oleh siswa berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan Dunn. Kekuatan utama PKL terletak pada aspek ketepatan tujuan dan efisiensi pelaksanaan, sementara aspek responsivitas dan pemerataan masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan program.

## 4.2 Pembahasan

#### 4.2.1 Interpretasi Temuan Berdasarkan Dimensi Evaluasi Kebijakan Dunn

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi evaluasi kebijakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berada pada kategori penilaian tinggi berdasarkan persepsi siswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum kebijakan PKL di SMK Negeri 1 Slahung telah diimplementasikan dengan kinerja yang baik dan selaras dengan tujuan pendidikan vokasi. Dalam kerangka evaluasi kebijakan Dunn, capaian ini merefleksikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga relatif efisien, memadai, adil, responsif, dan tepat sasaran.

Dimensi ketepatan (*appropriateness*) memperoleh skor tertinggi, yang menunjukkan bahwa siswa memandang PKL sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesiapan kerja dan memahami keterkaitan antara teori di sekolah dengan praktik di dunia industri. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018) bahwa ketepatan kebijakan mencerminkan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan kebutuhan nyata kelompok sasaran. Dalam konteks pendidikan vokasi, hal ini menegaskan bahwa PKL telah dipersepsikan siswa sebagai kebijakan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja.

#### 4.2.2 Efektifitas dan Efisiensi PKL sebagai strategi Human Capital

Dimensi **efektivitas** dan **efisiensi** juga menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa PKL tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis siswa, tetapi juga dikelola dengan pengaturan waktu, tugas, dan mekanisme pelaksanaan yang relatif baik. Dari perspektif teori *human capital*, PKL berfungsi sebagai bentuk investasi pendidikan yang memberikan pengalaman kerja autentik dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas individu (Becker, 1993; Schultz, 1961).

Temuan ini sejalan dengan studi empiris terkini yang menunjukkan bahwa program magang atau PKL yang terstruktur dapat meningkatkan kesiapan kerja, kepercayaan diri, dan kemampuan problem solving peserta didik (Deanda et al., 2024; Widjaja, 2025). Efisiensi pelaksanaan PKL juga menunjukkan bahwa sumber daya pendidikan seperti waktu, tenaga pembimbing, maupun fasilitas industri telah dimanfaatkan secara relatif optimal, sehingga memperkuat posisi PKL sebagai instrumen strategis pengembangan *human capital* di pendidikan vokasi.

#### 4.2.3 Kecukupan dan Pemerataan dalam Implementasi PKL

Dimensi kecukupan (*adequacy*) memperoleh penilaian tinggi, yang mengindikasikan bahwa durasi PKL, pembekalan pra-PKL, serta bimbingan selama kegiatan dinilai cukup oleh siswa untuk menguasai keterampilan kerja. Temuan ini relevan dengan kebijakan nasional yang menetapkan PKL sebagai mata pelajaran dengan durasi panjang dalam Kurikulum Merdeka, sehingga memberikan ruang belajar yang memadai bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja (Rahmatullah et al., 2023).

Namun demikian, meskipun berada pada kategori tinggi, dimensi pemerataan (*equity*) menunjukkan skor yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lain. Hal ini mengindikasikan adanya potensi ketimpangan pengalaman PKL antar siswa, baik dari aspek penempatan industri, perlakuan di tempat PKL, maupun dukungan yang diterima.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti tantangan pemerataan akses dan kualitas PKL di berbagai konteks SMK di Indonesia (Dewi et al., 2023; Muthi, 2024). Dalam perspektif evaluasi kebijakan, aspek pemerataan menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas kebijakan pendidikan.

#### **4.2.4 Responsivitas PKL terhadap Dinamika Industri dan Revolusi Industri 4.0**

Dimensi **responsivitas** memperoleh skor terendah meskipun masih berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, dari sudut pandang siswa, respons sekolah dan industri terhadap kebutuhan industri terkini dan perkembangan teknologi masih dapat ditingkatkan. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, responsivitas kebijakan pendidikan vokasi menjadi krusial karena dunia kerja mengalami perubahan yang cepat akibat digitalisasi, otomasi, dan integrasi teknologi cerdas (OECD, 2023; UNESCO, 2022).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan PKL tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan rutin, tetapi juga oleh kemampuan adaptif sekolah dan mitra industri dalam menyesuaikan jenis tugas, teknologi yang digunakan, serta mekanisme pembimbingan dengan perkembangan industri mutakhir. Studi OECD (2025) menegaskan bahwa *work-based learning* yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan vokasi di berbagai negara maju.

#### **4.2.5 Implikasi Teoretis terhadap Evaluasi Kebijakan dan Human Capital**

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi model evaluasi kebijakan Dunn dalam konteks pendidikan vokasi. Keenam dimensi evaluasi terbukti mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja kebijakan PKL dari perspektif penerima kebijakan. Pendekatan *evaluative judgement* memungkinkan analisis kebijakan yang tidak terjebak pada pengujian kausal semata, tetapi lebih menekankan pada kualitas implementasi dan kesesuaian kebijakan dengan tujuan strategis pembangunan *human capital*.

Selain itu, temuan ini juga menguatkan teori *human capital* yang menempatkan pengalaman kerja sebagai komponen penting dalam investasi pendidikan. PKL yang dinilai efektif, efisien, dan tepat sasaran berpotensi meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing lulusan SMK di era Revolusi Industri 4.0.

#### **4.2.6 Implikasi Praktis bagi Kebijakan dan Praktik PKL**

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, sekolah perlu mempertahankan dan memperkuat aspek ketepatan dan efisiensi PKL melalui perencanaan yang matang dan koordinasi yang berkelanjutan dengan mitra industri. Kedua, perlu upaya sistematis untuk meningkatkan responsivitas PKL terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, misalnya melalui pembaruan kurikulum, pelatihan pembimbing, dan peningkatan keterlibatan industri dalam perancangan kegiatan PKL. Ketiga, aspek pemerataan perlu menjadi perhatian khusus agar seluruh siswa memperoleh pengalaman PKL yang setara dan berkualitas, sejalan dengan prinsip keadilan dalam kebijakan pendidikan vokasi.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai kebijakan pendidikan vokasi di SMK Negeri 1 Slahung menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil analisis deskriptif dan sintesis evaluatif menunjukkan bahwa pelaksanaan PKL secara umum berada pada kategori baik dan telah memenuhi enam dimensi evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Dimensi ketepatan dan efisiensi menjadi aspek terkuat dalam implementasi PKL, yang menegaskan peran PKL sebagai strategi pengembangan *human capital* yang relevan dalam mendukung kesiapan kerja siswa di era Revolusi Industri 4.0. Meskipun

demikian, dimensi responsivitas dan pemerataan masih memerlukan penguatan agar PKL semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan industri dan menjamin kesetaraan kualitas pengalaman belajar bagi seluruh siswa.

### **Saran**

Sekolah disarankan untuk mempertahankan dan memperkuat aspek ketepatan serta efisiensi pelaksanaan PKL melalui perencanaan yang lebih terstruktur dan penguatan koordinasi dengan mitra industri. Selain itu, peningkatan responsivitas PKL terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja perlu dilakukan melalui pembaruan kurikulum, peningkatan peran guru pembimbing, serta pemanfaatan umpan balik dari industri.

Pemerataan kualitas pengalaman PKL juga perlu menjadi perhatian dengan memastikan penempatan, pendampingan, dan dukungan yang setara bagi seluruh siswa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan perspektif pemangku kepentingan lain, seperti guru dan industri, serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif guna memperkaya evaluasi kebijakan PKL.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Bajuri, I. (2025). Evaluasi program magang di SMK Muhammadiyah 2 Metro. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.)*. University of Chicago Press.
- Deanda, G. G., Darmawan, I. A., & Irwanto. (2024). Influence of industrial internship, work motivation, and communication skills on vocational school students' work readiness. *JEE (Jurnal Edukasi Elektro)*.
- Dewi, N. K. C., Dantes, K. R., & Widiana, I. W. (2023). Evaluasi pelaksanaan program praktik kerja lapangan (PKL) peserta didik kelas XI pada jurusan kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jurnalap.v14i1.1839>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.)*. Routledge.
- Muthi, I. (2024). Evaluasi program praktik kerja industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan karir peserta didik. *Dharmas Education Journal*.
- OECD. (2023). Building Future-Ready Vocational Education and Training Systems. In *OECD Reviews of Vocational Education and Training*. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/eb90e4d8-en/index.html?itemId=/content/component/eb90e4d8-en#snotes-d7e18125>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). *Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature*.
- Rahmatullah, N., Dharma, A. P., Safitri, D. A. W., & Kurnia, I. (2023). *Panduan Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sarmila, S., Moris, A., & Saril. (2025). Implementasi kebijakan praktik kerja lapangan (PKL) terhadap kesiapan kerja siswa di SMK Negeri 7 Bone. *Jurnal Mappesona*.

- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1).
- UNESCO. (2022). *UNESCO strategy for TVET 2022–2029: Transforming technical and vocational education and training for successful and just transitions*.
- Wahjusaputri, S., Rahmanto, M. A., Suciani, Kustantini, S., & Azizah, S. (2023). *Program SMK Pusat Keunggulan Centre of Excellence pada Pendidikan Menengah Vokasi*. Bintang Semesta Media.
- Widjaja, W. (2025). The effectiveness of technology-based internship programs in improving the skills of industrial technology vocational school students. *Jurnal Sains Dan Teknologi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jst-undiksha.v14i2.96975>